

SKRIPSI

**POLITIK HUKUM PIDANA PEMBENTUKAN UNDANG -UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN
2016 PASAL 45 AYAT (2) ATAS PERUBAHAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 PASAL 27 AYAT (2) TENTANG
PERJUDIAN/PENYEBARAN INFORMASI PERJUDIAN**

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar sarjana hukum*



Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H
Lucky Raspati, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

**POLITIK HUKUM PIDANA PEMBENTUKAN UNDANG -UNDANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 19 TAHUN
2016 PASAL 45 AYAT (2) ATAS PERUBAHAN UNDANG – UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 PASAL 27 AYAT (2) TENTANG
PERJUDIAN/PENYEBARAN INFORMASI PERJUDIAN**

*(Muhammad Jordy Prammulia, 1910112190, Hukum Pidana, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, viii+95)*

ABSTRAK

Perjudian online yang memiliki banyak kendala dalam pecegahan hingga penerapan sanksi pidananya, untuk meyelesaikan permasalahan tersebut diperlukannya ada pembaharuan hukum yang mengikuti perkembangan kejahatan ke arah yang lebih modern dan memenuhi kebutuhan masyarakat, dalam pembuatan hukum tersebut digunakan politik hukum pidana, agar hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. budaya dan sesuai dengan cita – cita negara. Namun kenyataannya dalam penerapannya masih banyak yang tidak sesuai dengan aturan yang dibuat. tujuan undang – undang tersebut yang tidak tercapai, sehingga perusahaan perusahaan perjudian di Indonesia semakin menyebar dan merugikan negara Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Hal apakah yang menjadi latar belakang perjudian dirumuskan kedalam Undang – Undang Infomrasi dan Transaksi Elektronik ITE), 2. Bagaimanakah penerapan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang perjudian dan penyebaran informasi perjudian dalam putusan pengadilan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang penulisannya bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan latar belakang judi di kriminalisasikan sebagai tindak pidana, urgensi perjudian online perlu dimasukkan kedalam undang – undang. serta politik hukum pidana Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektornik serta implementasi dan penerapannya pada pengadilan yang masih belum sesuai peraturan perundang - undangan

**Keywords: Polittk Hukum Pidana, Undang – Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik, Perjudian**